



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 31

Tahun : 2010

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG
WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS/ KEPALA BADAN/ INSPEKTUR INSPEKTORAT/
SEKRETARIS DPRD/ SEKRETARIS KPU/ KEPALA KANTOR/
KEPALA BAGIAN/ DIREKTUR RSUD/ CAMAT DALAM
PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan tugas Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

Nomor 31 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Mcmpcrhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1997.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA DINAS/ KEPALA BADAN/ INSPEKTUR INSPEKTORAT/ SEKRETARIS DPRD/ SEKRETARIS KPU/ KEPALA KANTOR/ KEPALA BAGIAN/ DIREKTUR RSUD**

Nomor 31 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

**/ CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
KUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.**

**BABI KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Sekretaris DPRD adalah Sekretraris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Sekretaris KPU adalah Sekretaris Komisi Pcmilihan Umum Kota Yogyakarta.
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Inspektorat dan Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekrctariat Daerah Kota Yogyakarta.
10. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Walikota Yogyakarta.
12. Penyesuaian Gaji adalah penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II PENDELEGASIAN
KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah / Kepala Dinas / Kepala Badan / Inspektur Inspektorat / Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Direktur RSUD / Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Yogyakarta.

**BAB III
PENYESUAIAN GAJI**

Pasal 3

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- (2) Bilamana Sekretaris Daerah berhalangan, maka Pejabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah mempunyai wewenang untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- (3) Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat mempunyai kewenangan menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
- (4) Bilamana Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Kepala

Nama Tanpa Gelar Tanpa NIP

Tembusan :

- Yth.1. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
3. Pengurus Gaji Instansi yang bersangkutan;
4. Yang Bersangkutan.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 31 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris KPU/ Sekretaris DPRD/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PERTAMA : Terhitung mulai 01 Januari 2010 menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tempat/ Tanggal Lahir	
4.	Pangkat, Golongan Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	Tahun Bulan
6.	Gaji Pokok Lama	Rp.
7.	Gaji Pokok Baru	Rp.
8.	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	Tahun Bulan
9.	Jabatan	
10.	Unit Kerja	
11.	Keterangan	

Nomor 31 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- DPRD/ Sekretaris KPU/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/Direktur RSUD/ Camat berhalangan, maka Pejabat Pelaksana Harian Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat mempunyai wewenang menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
- (5) Kepala Dinas Pendidikan dapat Mendelegasikan sebagian kewenangan Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNSnya kepada Kepala UPT Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan; dan kepada Kepala SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri, kecuali untuk PNS yang diperbantukan di SMP swasta, SMA swasta, dan SMK swasta.

Pasal 4

- (1) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan kerjanya dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**BAB IV KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah / Kepala Dinas / Kepala Badan / Inspektur Inspektorat / Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Direktur RSUD / Camat dalam Penetapan Penyesuaian Pangkat dan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 31 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 APRIL 2010

**FORMAT PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK
KOP INSTANSI**

KEPUTUSAN KEPALA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010. maka perlu menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;